

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Daerah Sertifikat Tanah di Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan pelaksanaan Program Daerah Sertifikat Tanah di Bandar Lampung. Aspek konsistensi, sudah sesuai dengan prosedur penyuluhan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Aspek transmisi, partisipasi yang kurang dari masyarakat. Aspek kejelasan terbagi menjadi dua, langsung dan tidak langsung, langsung melalui penyuluhan sudah berjalan dengan baik, sedangkan yang tidak langsung terlihat dengan adanya pemberitaan di media massa tidak efektif karena belum lengkap dan jelas.
2. Faktor sumber daya berjalan kurang baik, hal tersebut dapat dilihat dari aspek sumber daya manusia (staff) dalam Implementasi Program Daerah Sertifikat Tanah di Bandar Lampung pihak BPN mengalami kekurangan atau keterbatasan sumber daya manusia. Aspek informasi telah berjalan dengan baik sebagai bahan acuan pelaksanaan kebijakan. Aspek kewenangan belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari kewenangan implementor yakni pihak BPN selaku pelaksana yang menerbitkan sertifikat dari data tanah pemohon

1711 baru selesai 802 dan sisanya belum terselesaikan. Sedangkan dari aspek fasilitas sudah terpenuhi dengan baik.

3. Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Daerah Sertifikat Tanah di Kota Bandar Lampung para pelaksana kebijakan mempunyai sikap dan motivasi yang tinggi untuk pelaksanaan Program Daerah Sertifikat Tanah di Kota Bandar Lampung. Mereka cenderung mendukung adanya program ini sedangkan masyarakat juga sangat antusias.
4. Berkaitan mengenai struktur birokrasi, berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek penggunaan SOP. Aspek fragmentasi, melalui pernyataan informan mengenai koordinasi dan tanggungjawab BPN dan Pemerintah Kota yang mengatakan bahwa pelaksana kebijakan melakukan koordinasi dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan sertifikat tanah di Kota Bandar Lampung.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti dapat berikan dalam Implementasi Program Daerah Sertifikat Tanah Di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Perlu diberikan pelatihan kepada pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan, serta SDM yang terkait dengan Program Sertifikat Tanah Gratis agar dapat memahami konsep dan substansi kebijakan, program, kegiatan program ini di Kota Bandar Lampung, sehingga tercipta SDM yang berkualitas.
2. Implementasi Program Sertifikat Tanah Gratis di Kota Bandar Lampung, komunikasi dalam hal ini berupa sosialisasi pada masyarakat lebih ditingkatkan lagi, baik dalam hal kuantitas dan kualitas sosialisasi. Hal ini diharapkan agar

masyarakat lebih mengerti akan pentingnya program ini, sehingga mereka mampu mendukung adanya program ini.

3. Sumber-sumber yang mendukung dalam Implementasi Program Sertifikat Tanah Gratis Di Kota Bandar Lampung lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah dan pihak BPN. Hal ini menyangkut masalah sumber daya manusia dan kewenangan dari kedua belah pihak tersebut. Sumber daya manusia harus lebih berkualitas sesuai dengan tupoksi dan kualifikasi pendidikan sedangkan, kewenangan BPN harus lebih cepat tanggap dalam menangani sertifikat tanah.
4. Membangun pola komunikasi yang baik antara instansi yang terlibat dalam Program Sertifikat Tanah di Kota Bandar Lampung, serta membangun pola komunikasi yang baik pula antara pemerintah sebagai implementor dengan masyarakat sebagai kelompok masyarakat agar tujuan dari implementasinya program sertifikat tanah dapat tercapai.